

ABSTRAK

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI PRAKTIK *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI SELAT MALAKA TAHUN 2014-2019

Oleh

DHINNE RAMADHANI

Selat Malaka merupakan wilayah yang menjadi salah satu jalur lintas pelayaran oleh negara-negara lain. Sehingga akan sangat rawan terjadi praktik IUU *Fishing* di wilayah tersebut. Praktik ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing mancanegara tersebut telah menimbulkan banyak kerugian, terutama kerugian secara materiil dan mengancam kedaulatan yang dimiliki Indonesia sendiri. Melalui UU No. 45 Tahun 2009, pihak pelaku IUU *Fishing*, kapal nelayan ilegal dapat ditenggelamkan oleh otoritas berwenang dan pelaku akan diwajibkan membayar denda hingga milyaran rupiah. Namun, meski UU tersebut telah secara legal efektif di Indonesia, namun praktik IUU *Fishing* masih terjadi tiap tahunnya hingga menimbulkan kerugian mencapai lebih dari Rp50 trilyun tiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka. Serta mendeskripsikan diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka di tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi maritim dan konsep kepentingan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari studi literatur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia melakukan diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kesamaan dalam memandang IUU *Fishing* sebagai ancaman negara, serta berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif antara negara. Diplomasi ini dilakukan dengan menggunakan 3 komponen utama yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif.

Kata Kunci : Diplomasi Maritim, IUU *Fishing*, Selat Malaka, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

INDONESIA'S MARITIME DIPLOMACY IN DEALING WITH ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING IN THE MALACCA STRAIT 2014-2019

By

DHINNE RAMADHANI

The Malacca Strait is an area that becomes one of the shipping routes by other countries. So it will be very prone to IUU Fishing practices in the region. This illegal practice by foreign fishermen has caused many losses, especially material losses and threatens Indonesia's sovereignty. Through Law No. 45/2009, the perpetrators of IUU Fishing, illegal fishing boats can be sunk by the authorities and the perpetrators will be required to pay fines of up to billions of rupiah. However, even though the law has been legally effective in Indonesia, the practice of IUU Fishing still occurs every year, causing losses of more than Rp50 trillion each year. The purpose of this research is to describe the practice of IUU Fishing in the Malacca Strait. And to describe Indonesia's maritime diplomacy in handling IUU Fishing practices in the Malacca Strait in 2014-2019. This research uses the concept of maritime diplomacy and the concept of national interest. By using a qualitative approach to answer research questions by collecting secondary data obtained from literature studies. The results of this study show that Indonesia conducts diplomacy and cooperation with countries that have similarities in viewing IUU Fishing as a state threat, and contributes to creating conducive conditions between countries. This diplomacy is conducted using 3 main components, namely cooperative, persuasive, and coercive.

Keywords: Maritime Diplomacy, IUU Fishing, Malacca Strait, National Interest.